

## ARGUMEN ISU-ISU AGAMA KONTEMPORER SERTA IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN AGAMA

Oleh:

Abas Asyafah

### A. PENDAHULUAN

Agama dan politik seolah-olah memiliki 'teritorial' masing-masing dan di antara keduanya harus terpisah, Pola hubungan antara keduanya perlu diperjelas. Demikian halnya isue-isue kontemporer keagamaan lainnya. Hal ini amat urgen dan mendesak untuk mengambil sisi positifnya serta menghindari dampak negatifnya. Untuk itu perlu dikaji: a) mengapa agama dijadikan alat dan justifikasi politik, b) Mengapa terjadi pencampuradukan ajaran agama dengan politik, c) Mengapa ada kecenderungan pembiasaan terhadap pemaknaan agama, dan d) Mengapa muncul pemahaman keagamaan kontemporer (fundamentalisme, radikalisme, militanisme, dan terorisme). Keempat persoalan ini kait mengkait satu sama lainnya. Metoda deskriptif dengan studi kepustakaan akan digunakan untuk analisis persoalan ini. Hasil pembahasannya akan bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Oleh karena itu makalah ini didisain dengan judul "*Argumen Isu-Isu Agama Kontemporer Serta Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Islam*". Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan.

**Kata Kunci:** Agama, politik, simbiotik, bias agama, fundamental, radikal, militant, dan teror.

## **B. AGAMA SEBAGAI ALAT DAN JUSTIFIKASI POLITIK**

Realitas politik sangat paradoks dengan pengertian teori normatifnya, sebab dalam realitasnya, perilaku politik dan norma teoretisnya terdapat tabir pemisah, seakan-akan keduanya berbeda jalan. Paradigma perilaku politik, bagi kebanyakan politisi, mengkristal menjadi kekuasaan sebagai tujuan akhir, sehingga tindakan macheavallistik, seperti dusta, menjegal, oportuniste, dan perilaku amoral lainnya menjadi hal biasa, bahkan harus dilakukan demi tercapainya kepentingan. Sedangkan norma teoretis politik hanya menjadikan kekuasaan sebagai perantara untuk mewujudkan nilai ideal sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga, norma politik selalu mengedepankan kamus moral dalam mencapai kekuasaan.

Sebagai akibat dari adanya pengharaman politik bagi sebagian kelompok agama (Islam), maka paradigma politik menjelma menjadi rumus logika politik yang diwariskan oleh kaum penjajah. Rumus logika politik yang dimaksud adalah berpolitik berarti memburu kekuasaan, dengan cara apapun, semuanya mungkin dan legal demi tercapainya tujuan kekuasaan itu. Cara politik seperti ini akhirnya dengan tanpa *tedeng aling-aling* akan menegasikan norma agama. Hingga, adagium yang lumrah terdengar di tengah masyarakat adalah 'jika berpolitik tinggalkanlah agama, dan jika menekuni agama tinggalkanlah politik'.

Pada akhirnya politik dan agama memiliki 'teritorial' masing-masing dan di antara keduanya harus terpisah. Para penghuni wilayah agama menjadi nista jika berpolitik dan para politisi merasa lumrah dan seakan tanpa dosa jika meninggalkan agama. Walaupun kadang-kadang agamawan dan politisi sama-sama bekerja sama dalam berpolitik, dan bahkan sama-sama mempolitisasi agama.

Mengapa antara politik dan agama seolah berbeda jalan? Mengapa agama sering dijadikan alat dan justifikasi politik? Untuk menjawab permasalahan ini, kita akan pelajari 1) macam-macam pola hubungan antara agama dan politik, 2) Argumen agama dijadikan alat dan justifikasi politik, dan 3) nilai-nilai esensial untuk pengembangan Pendidikan Nilai (khususnya PAI).

### **1. Pola Hubungan Agama dan Politik**

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, Ada tiga pola hubungan antara agama dan politik, yaitu pola hubungan yang bersifat integralistik, skularistik, dan simbiotik. **Pertama;** Pola hubungan integralistik. Agama dan negara merupakan kesatuan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena itu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. **Kedua,** Pola hubungan sekularistik. Pola ini menolak hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Pola ini sama sekali memisahkan agama dari negara. **Ketiga,** Pola hubungan simbiotik. Dalam pola ini antara agama dan negara satu sama lain saling memerlukan serta saling menguntungkan. Dengan negara, agama akan berkembang dan terlindungi, dan dengan agama negara mendapat bimbingan etika serta nilai-nilai akhlaq yang mulia. Merujuk pada tiga model di atas, termasuk model manakah perpolitikan di Indonesia, mengapa demikian? Deskripsi berikut dapat diikuti sebagai argumentasinya.

### **2. Argumen Agama Dijadikan Alat dan Justifikasi Politik**

Sekaitan dengan deskripsi di atas, fenomena perpolitikan di Indonesia sekarang, kita dapat melihat bahwa di Indonesia cenderung berada pada model ketiga, yakni pola simbiotik. Mengapa? Ada beberapa argumen (sebagai jawaban hipotetik) yang melandasinya yaitu sebagai berikut:

- a. Logika religius memandang agama sebagai petunjuk dan penuntun umat manusia, sekaligus dipandang sebagai sumber petunjuk yang bersifat eksternal, transendental, abadi, absolut dan mutlak dengan segala kesempurnaan.
- b. Agama dan negara, satu sama lain saling memerlukan serta saling menguntungkan. Dengan negara, agama akan berkembang dan terlindungi, dan dengan agama negara mendapat bimbingan etika serta nilai-nilai akhlaq yang mulia.
- c. Orang-orang yang pemahaman keagamaannya sangat literer (harfiah) mereka cenderung untuk melakukan tindakan politik tertentu, termasuk tindakan kekerasan.
- d. Untuk tegaknya agama butuh politik, oleh karena itu tidak ada kebaikan dalam agama jika mengasingkan politik, dan tidak ada kebaikan dalam politik jika meninggalkan agama. Dalam hal ini agama bagaikan pondasi, sedangkan kekuasaan adalah ibarat penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan roboh dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang.
- e. Fenomena politik di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan orde reformasi sekarang pun sama saja. Sejak semula mereka berpolitik, kemudian diberikan justifikasi keagamaan untuk menarik simpatik umat beragama.

Atas dasar argumen di atas, fenomena yang muncul sepanjang sejarah bangsa Indonesia, muncullah beberapa pergerakan, yang pada garis besarnya dapat dibagi dua. *Pertama*, kelompok yang ingin mendirikan Negara berdasarkan agama tertentu misalnya Negara Islam Indonesia (NII), Darul Islam (DI), KW-11 dan lain-lain. *Kedua* kelompok yang komitmen dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok pertama tidak ada tempat

untuk berkembang di Indonesia, karena Indonesia sebagai Negara yang berdaulat pasti berhadapan dengan kepompok pertama ini. Oleh karena itu yang paling mungkin tumbuh dan berkembang adalah kelompok kedua, yakni mendirikan partai berdasarkan agama sebagai implementasi dari pola simbiotik dalam hubungan antara agama dan politik.

Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa banyak kelompok muslimin yang mendirikan partai (Islam)? Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan landasan, yaitu:

- a. Dengan diundangkannya Undang-Undang Partai Politik RI berarti keran demokrasi dan kebebasan telah terbuka. Hal ini mengandung implikasi bahwa telah terbukalah kebebasan seluruh warga Negara untuk berpolitik, termasuk umat beragama (Islam) untuk mendirikan partai politik berasaskan agama (Islam).
- b. Berdasarkan Undang-undang tersebut, bahwa partai merupakan lembaga yang konstitusional dalam menyalurkan aspirasi politik umat.
- c. Dalam teologi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, berpolitik itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemahaman keberagamaan Islam. Seorang Muslim yang benar adalah ketika pengetahuan agama digunakan untuk kehidupan dunianya. Demikian juga halnya dengan partai-partai yang berdasarkan agama (Islam) lainnya.
- d. Sejalan dengan teologi politik pada bagian c di atas, adanya realitas keyakinan muslimin yang mengharuskan seorang muslim untuk menjalankan kehidupan secara Islami. Cara tepat untuk merealisasikannya adalah tatkala dipayungi hukum dan undang-undang. Partai merupakan bentuk yang bisa mangakomodasi kepentingan ini.

### C. CAMPUR ADUK AJARAN AGAMA DAN POLITIK

Isue agama kontemporer yang tak kalah pentingnya untuk dikritisi oleh kita sekarang adalah fenomena mencampuradukkan antara ajaran agama dan politik. Apa apa pula akar masalahnya, dan mengapa hal ini terjadi?

#### 1. Akar Masalah

**Pertama;** Adapun yang melatarbelakangi fenomena mencampuradukan antara ajaran agama (Islam) dan politik karena landasan filosofis mereka tentang politik dan fiqh politik berkaitan dengan pemaknaan "*Islam Kaaffah*". Dalam ajaran Islam ada kewajiban bagi seorang mukmin untuk masuk Islam secara *kaafah* (total), sebagaimana firman Allah Swt (Q.S. al-Baqarah, 2: 208): "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (total)*". Adapun maksud "masuklah kamu ke dalam Islam secara *kaaffah*" adalah setiap mukmin harus menjalankan Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Atas dasar pemikiran inilah mereka menyatukan (mencampuradukkan) agama dengan politik. **Kedua;** Terdapat pemahaman yang perlu dikritisi dalam berpolitik di Indonesia yang telah dan sedang menggurita dalam benak masyarakat Muslim. Hal ini, menurut Nasution (2007: 4) paling tidak karena ada dua faktor, yaitu:

- a. Realitas perilaku politik sangat banyak contoh dan bukti rill, bahwa orang-orang yang dianggap memiliki label keberagamaan, seperti kiai, ustadz, dan buya seringkali larut dan terperangkap dalam dinamika politik picisan yang serupa dengan orang yang tidak mengetahui norma agama. Sehingga timbul kesan bahwa agamawan dan bukan agamawan menjadi sama saja jika berada dalam ruang politik. Akibatnya, agama menjadi tertuduh

sebagai alat legitimasi politik *ansich*. Agama terfitnah menjadi justifikasi-justifikasi sempit dan terbatas sesuai dengan interpretasi pesan syahwat penggunanya.

- b. Adanya pengaruh dari pola pikir yang ditanamkan oleh Barat terhadap dunia Islam. Semboyan agama untuk Tuhan, dan negara untuk semua merupakan ungkapan yang seringkali nyaring didengungkan di tengah dunia Islam. Juga, adagium gereja sebagai pewaris sekularisme yang inti pesannya memisahkan agama dengan negara. Ungkapan '*berikan hak Tuhan kepada Tuhan dan hak kaisar kepada kaisar*' merupakan fakta bahwa dogma gereja sangat antipati dengan penyatuan agama dan negara. Walaupun pada keyataannya mereka tetap saja menjadikan politik sebagai kendaraan dalam menyemai norma agamanya. Di Barat juga selalu saja dalam mengurus persoalan keagamaan menggunakan otoritas politik negara.

Kedua faktor di atas memberi andil yang signifikan terhadap paradigma politik pada pelbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Pemahaman dikotomik terhadap agama dan politik di Indonesia cukup banyak mempengaruhi perjalanan dalam bernegara dan berbangsa yang akhirnya memberi identitas Indonesia sebagai negara yang netral terhadap agama. Ujung-ujungnya Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim terbelenggu dalam aturan-aturan hukum yang tidak bersumber dari syariat Islam sehingga tampak hasilnya menunjukkan bahwa meskipun muslim Indonesia mayoritas dalam segi jumlah, tetapi minoritas dalam penguasaan politik.

**Ketiga;** Ada juga pemikiran sebagian kaum muslimin yang berpandangan bahwa Islam tidak memerintahkan untuk mendirikan negara dan tidak memiliki konsep tentang

sistem politik atau teori ketatanegaraan, namun ajaran Islam itu sarat dengan norma dan etika untuk membimbing aktivitas politik serta mengendalikan aturan main hukum ketatanegaraan. Ungkapan "Islam Yes, Partai Islam No" cukup sebagai contoh kelompok ini. Karena menurut mereka bahwa di dalam al-Qur'an tidak ditemukan perintah mendirikan Negara, tetapi hanya ditemukan beberapa prinsip umum sebagai etika bernegara.

Memang pemikiran mereka tidak bisa disalahkan begitu saja, sebab pemikiran "Islam non politik" yang dimaksud adalah bahwa tanpa ditambah politik, Islam itu sudah lengkap. Menata masyarakat muslimin bukan dengan sistem pemerintahan atau lembaga politik. Tetapi dengan sistem yang telah Allah tetapkan, yaitu system *Jama'ah-Imamah* atau *Khilafah*. Dalam pandangan mereka, jika politik turut dipakai untuk mengatur masyarakat muslimin, maka berarti telah melakukan *talbisul haq bil baathil*, yaitu mencampur adukan wahyu Allah yang bersifat absolut/mutlak dengan hasil olah fikiran manusia yang relatif. Motivasi, target, sasaran, serta cara-cara dan aturan main politik terfokus pada upaya untuk memperoleh kekuasaan. Padahal Allah dan Rasul-Nya mengharamkan adanya ambisi terhadap kekuasaan/jabatan. Tanpa perlu dicari atau direbut dari pihak lain, kekuasaan sudah Allah janjikan pada mereka yang beriman dan beramal shalih, sebagaimana firman-Nya dalam QS. an-Nur, 24: 55 sebagai berikut:

*"Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah*

*mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyem-bahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik".*

## **2. Argumen Pencampuradukan Antara Agama dan Politik**

Menurut hemat penulis, paparan di atas sudah cukup jelas memberikan landasan filosofis dan landasan quranik sebagai akar persoalan isu ini. Namun sebagai jawaban hipotetik bagi kita, kiranya perlu argumen tambahan dari realita yang terjadi di Negara kita Inonesia. Ada sejumlah argumen menarik yang patut dikritisi dan didiskusikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagaimana dilaporkan oleh sosiolog Kahmad (2000: 100) bahwa 'banyak partai politik –di Indonesia- yang berdasarkan agama. Banyak pemimpin agama menjadi pemimpin dari suatu partai politik. Banyak juga partai politik didirikan untuk menjadi wadah aspirasi umat beragama dalam menyuarakan hak-haknya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti tentang peranan agama dalam politik suatu negara, peranan pemimpin agama dalam gerakan protes, atau bagaimana bentuk partai politik yang berasaskan suatu agama'.
- b. Indonesia termasuk Negara yang berkembang. Salah satu karakteristiknya adalah agama biasanya dijadikan komoditas politik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kahmad (2000: 100) bahwa 'bagi masyarakat berkembang, agama selalu menjadi komoditas politik untuk menarik massa dan sumber isu untuk menarik simpati atau memojokkan suatu kelompok'.
- c. Ada tokoh olitik bila ingin mendapatkan dukungan publiknya, dia membawa-bawa agama agar sikap poli-

tiknya tampak seolah-olah dibenarkan agama. Hal ini mengandung pengertian bahwa dia sudah mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil serta menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murahan (*tsamanan qaliila*).

- d. Dalam pandangan Watt (2003: 132) bahwa 'Kebenaran penting yang mungkin disepakati oleh orang-orang Kristen –sekalipun- yakni bahwa negara apa pun tidak akan sempurna bila tidak dilandasi nilai-nilai moral (*moral values*), seperti yang tersirat dalam *syariah* dan juga dilandasi keimanan kepada Tuhan sebagai penegak moralitas dan keadilan'.
- e. Agama dianggap penting dalam politik bangsa, karena menurut Double (2007:183-208) menyatakan bahwa 'Peran agama (Islam) dalam pembinaan moral bangsa adalah sebagai: 1) Pengisi perbendaharaan moral, b) Pengarah terhadap keseimbangan antara budaya dan agama, c) Motivator, dinamisator, dan inovator dalam menghadapi tantangan zaman, d) Pembuka wawasan ke arah yang lebih luas, dan e) Acuan moral guna mencapai tingkat yang lebih mantap.

#### **D. PEMBIASAN TERHADAP PEMAKNAN AGAMA**

Setidaknya ada dua subjudul yang perlu dibahas pada isu ini, **pertama** pemaknaan agama atau kebenaran agama, dan **kedua** kecenderungan pembiasaan kebenaran agama. Dua sub judul ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan pokok sebagai bahan diskusi kita pada isu ini yaitu "Mengapa pemahaman dan pemaknaan terhadap agama cenderung mengalami pembiasaan? Tulisan berikut – minimal- menjadi jawaban hipotetik untuk diskusi dan kajian lebih lanjut dan penulis mengawalinya dengan pengertian-pengertian.

## 1. Pemaknaan Agama (Kebenaran Agama)

Pemaknaan berasal dari kata dasar makna (Bahasa Arab) sama dengan arti atau maksud. Jadi 'pemaknaan agama' sama dengan maksud yang sebenarnya tentang ajaran agama (Islam), atau kebenaran yang sesungguhnya dalam ajaran agama (Islam), singkatnya kebenaran agama (Islam). Kebenaran dalam pandangan Islam berakar pada hakikat Islam sebagai ajaran dan risalah yang diturunkan Allah untuk mencapai kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sendi dasar dari sikap yang tertanam dalam jiwa muslim adalah iman. Menurut orang beriman, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan kebenaran yang harus disampaikan kepada umat manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah (Q.S. al-Kahfi,18: 29):

*Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.*

Bagi muslim, kebenaran adalah Islam itu sendiri, yang tertuang dalam wahyu dan disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Quran. Dalam kitab suci itu, Allah mengungkapkan pengertian tentang kebenaran namun menggunakan bahasa wahyu. Pengertian-pengertian ini memang untuk dipahami oleh manusia dengan memperhatikan pengertian-pengertian dasarnya.

Menurut Ali (t.t.:14), terdapat beberapa kesulitan untuk mengungkap berbagai pengertian tentang kebenaran

yang sama persis dengan pengertian yang dikehendaki Al-Quran. Kesulitan-kesulitan itu adalah:

- a. Karena Allah adalah Zat yang tidak terbatas dan mutlak, sehingga tidak dapat dipahami oleh sesuatu yang nisbi (manusia).
- b. Bahasa yang dipakai umat manusia adalah bahasa indriawi yang lahir serta terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Akibatnya, tidak mungkin memahami Zat yang tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Kesulitan ini menimbulkan perbedaan pemahaman atau pendapat dan kerangka pemahaman terhadap kebenaran yang tertulis dalam Al-Quran tersebut.
- c. Kebenaran yang diturunkan Allah mempunyai pengertian yang padat sekali sehingga melahirkan kerangka pemahaman yang mungkin berbeda-beda.

Jadi secara ringkas dapat disimpulkan bahwa umat Islam dalam memandang kebenaran yang diturunkan Allah dipahami dalam bentuk *esoteris* maupun *eksoteris*. Isi kebenaran yang senantiasa dipahami bisa berupa dua bentuk, antara dua kebenaran itu tidak terjadi pertentangan.

Zubaedi (2007:122) menyarankan cara dalam menemukan kebenaran dalam Islam, yaitu bahwa Allah mewahyukan Al-Quran sebagai petunjuk (*hudan*) bagi manusia. Hal ini berarti Al-Quran merupakan salah satu alat untuk mencapai kebenaran. Penjabaran isi kebenaran yang bersumber dari pemberian Allah ini, jika menggunakan kerangka filsafat disebut pola pikir deduktif. Dalam konstruksi berpikir demikian, ide dasar yang tertuang dalam Al-Quran dipandang sebagai premis mayor yang diharapkan dapat menelorkan kesimpulan-kesimpulan deduktif. Premis-premis Al-Quran ini dapat ditemukan dengan cara me-

mahami pengertian yang terkandung di dalam wahyu Tuhan tersebut. Kegiatan intelektual keagamaan semacam ini sudah lama digeluti kaum muslimin, khususnya di kalangan ulama yang mengembangkan disiplin tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode analitis. Warisan kultural Islam yang ada juga telah memberikan temuan berbagai macam teori yang ditelorkan dengan model penalaran deduktif dan premis-premis Al-Quran, baik yang dikemukakan oleh para filosof muslim, para teolog, maupun perumus ilmu pengetahuan yang lain. Dengan demikian, cara memperoleh kebenaran dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) dimulai dengan sikap beriman kepada Al-Quran lengkap dengan segala isinya, (2) memahami premis-premis dan kandungan Kitab Suci ini, (3) menelorkan pengertian deduktif dan kandungan kebenaran baik dari Al-Quran, alam maupun dari manusia, (4) membandingkannya dengan kenyataan faktual di alam semesta dan (5) akhirnya dirumuskan sebuah teori ilmu pengetahuan.

## **B. Argumen Pembiasan Kebenaran Agama**

Istilah pembiasan oleh Moeliono (1990:113) diartikan sebagai penyimpangan, atau membelok dari arah yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pembelokan atau penyimpangan pemahaman kebenaran ajaran agama dari yang yang sesungguhnya. Mengapa terjadi pembiasan terhadap pemahaman kebenaran Agama? Jawaban hipotetik dapat penulis sajikan sebagai berikut: **Pertama;** karena kesulitan untuk menemukan kebenaran pemahaman agama sebagaimana telah dikutip oleh Ali di atas, **Kedua;** Kesalahan hermeunitika menafsirkan bahasa agama, karena dalam al-Quran terdapat ayat-ayat *mutasyabihat*, bermakna samar, *interpretable*. Sebagaimana dikemukakan oleh Hidayat (2003: xi). **Ketiga;**

Dalil-dalil atau bukti-bukti belum diketahui oleh orang yang “memaknai” urusan agama (Azhim, 2005: 201). **Keempat;** Kemampuan orang yang “memaknai” suatu masalah agama belum menjangkaunya akau ia lupa (Azhim, 2005: 201). **Kelima;** Memahami agama secara parsial, sepotong-sepotong, dan menerima sebagian serta menolak yang lainnya (Azhim, 2005: 201) . **Keenam;** Agama disampaikan dengan cara (metoda) yang keliru (salah) oleh para misio-naris, juru dakwah, pengajar, dll. **Ketujuh;** Stuasii dan motivasi politik sepeninggal nabi cenderung memasukkan unsur-unsur lain (politik) ke dalam agama, atau menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepentingan politis. **Kedelapan;** Situasi sosial sekarang berbeda dengan saat lahirnya agama-agama, dan kita tidak bisa bertanya langsung kepada pembawa agama tersebut (Nabi). Kesembilan; Teks (wahyu) bersifat *mujmal* (umum) dan fleksibel, sehingga memungkinkan atau berpeluang untuk pembiasaan makna dan kebenaran agama.

## **E. PAHAN KONTEMPORER**

Sedikitnya ada empat paham kontemporer yang perlu pengkajian untuk mempertegas kedudukan dan persoalan yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu fundamentalisme, radikalisme, militanisme, dan terorisme. Keempat persoalan ini kait mengkait satu sama lainnya dan sering ditudingkan dengan Islam, setidaknya dikait-kaitkan dengan sekelompok muslimin.

### **1. Fundamentalisme**

Pengertian fundamentalisme berasal dari kata fundamental. Menurut Moeliono (1990:245) fundamental artinya bersifat dasar, pokok dan mendasar. Fundamentalisme berarti penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang merasa perlu kembali ke ajaran agama

yang asli seperti tersurat dalam kitab suci. Sedangkan fundamentalisme adalah paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal. Sementara di pihak lain, Amin (1993: 10) mendefinisikan fundamentalisme sebagai aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara kaku (*rigid*) dan literalis (tekstual). Sedangkan menurut Tibi (2000:X) bahwa fundamentalisme merupakan sebuah gejala ideologi yang muncul sebagai respon atas problem-problem globalisasi, fragmentasi dan benturan peradaban. Istilah ini menimbulkan suatu kesan tertentu, misalnya: ekstremisme, fanatisme, atau bahkan terorisme dalam mewujudkan dan mempertahankan keyakinan keagamaan. Lebih spesifik lagi, istilah fundamentalisme sebagaimana yang ditulis dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1968) adalah sebuah nama gerakan agresif dan konservatif di lingkungan gereja Kristen Protestan di Amerika Serikat yang berkembang dalam dasawarsa sesudah Perang Dunia I. Gerakan ini tercetus terutama di lingkungan gereja *baptist*, *disciple* dan *presbyterian* yang memperoleh dukungan dari kalangan atau kelompok kependetaan lainnya dengan W.J. Bryan sebagai tokohnya.

Kapan suatu gerakan dikategorikan fundamentalisme? Martin (<http://www.geoties.com>.) merinci kategorinya sebagai berikut: *Pertama*; Fundamentalisme bersifat *oppositionalism* (paham perlawanan), yaitu sikap atau gerakan yang selalu melawan terhadap hal (baik ide sekulerisme maupun modernisme) yang bertentangan dan mengancam eksistensi agama. *Kedua*; Fundamentalisme bersifat penolakan terhadap paham hermeneutika, yakni penolakan terhadap sikap kritis atas teks dan interpretasinya. *Ketiga*; Fundamentalisme bersifat penolakan ter-

hadap paham pluralisme dan relativisme yang keduanya dihasilkan dari pemahaman agama yang keliru. *Keempat*; Fundamentalisme bersifat menolak terhadap paham sosiologis dan historis, yakni perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci.

Sedikit berbeda dengan analisis Martin di atas, Tibi (2000: X) mengungkapkan empat karakter yang menjadi platform gerakan kaum fundamentalisme, antara lain: *pertama*, mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama. *Kedua*, menolak pluralisme dan relativisme. *Ketiga*, memonopoli kebenaran atas tafsir agama. *Keempat*, gerakan fundamentalisme mempunyai korelasi dengan fanatisme, eksklusifisme, intoleran, radikalisme dan militanisme.

Berkenaan dengan istilah Islam Fundamental, apabila dikaitkan dengan uraian tentang makna serta karakter paham fundamentalisme di atas, maka dapat dikatakan bahwa Islam Fundamental adalah sebuah paham keislaman yang menitikberatkan pada pemaknaan teks-teks keagamaan secara literal-tekstual, dengan mengabaikan sisi sisi kontekstual-substantifnya. Akan tetapi, yang dilaporkan oleh Martin (<http://www.geoties.com>.) bahwa akhir-akhir ini fundamentalisme ada yang dialamatkan kepada kelompok muslim, tetapi stigmanya cenderung dikonstruksikan sebagai hal negatif yang diasumsikan selalu membuat kerusakan dan kerusakan. Padahal sesungguhnya bukan hanya terjadi pada kelompok muslim, tetapi pada agama lain pun terjadi.

Adapun argument munculnya gerakan fundamentalisme karena sebab-sebab berikut:

1. Akar Historis Fundamentalisme; Diaporkan oleh Jerry Falwell dan Jimmy Baker ([http://www. geoties.com.](http://www.geoties.com)) bahwa awal mula adanya kaum fundamentalisme di dunia terjadi di Amerika Serikat, ia muncul sebagai respons, reaksi, protes, dan oposisi terhadap modernisme dan postmodernisme (yang menafsirkan ayat secara elastis/fleksibel), yang dituding sebagai penyebab agama semakin terisolir dan hancur. Di dunia Islam fundamentalisme muncul sebagai idiologi protes/oposisi kaum Khawarij atas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dalam agama Kristen fundamentalisme awal munculnya karena mengajarkan agama yang baku, cenderung meringankan hingga akhirnya menjadi kacau, keadaan itu menjadi sumber kecemasan baru setelah obat bius dan alkoholisme.
2. Politis Fundamentalisme; Sebagaimana dilaporkan oleh Thomas Meyer (Jalaludin, 2007:324-235) melaporkan bahwa pada awal Pebruari 1992, di Munich, Jerman, berlangsung konferensi untuk mengantisipasi gerakan fundamentalisme (*The Munich Conference on Security Policy*), yang disponsori oleh negara-negara Atlantik Utara (NATO). Konferensi ini dihadiri oleh kalangan militer, politisi, pakar Barat dan petinggi lainnya. Muncul persepsi tentang "fundamentalisme Islam" sebagai "ancaman berikutnya" terhadap NATO, sesudah berakhirnya ancaman komunisme.
3. Stigma Barat; Menurut John L. Elposito (Jalaludin, 2007: 326), bahwa Al-Qaida dan jaringannya jamaah Islamiyah sering dituding sebagai gerakan fundamentalime sekaligus teroris. Sebetulnya fundamentalisme dalam Islam terarah pada *islah* (perbaikan) dan *tajdid* (pembaharuan).

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Azra (Tempo, 15 Desember 2002), sedikitnya ada dua argument munculnya gerakan fundamentalisme di Indonesia, yaitu karena sebab-sebab berikut:

- a. Faktor Sejarah; Pada pasca kemerdekaan dengan munculnya DI/TII. Sebuah gerakan politik atau memiliki agenda politik yang memakai agama, justifikasi agama, dan sebagainya. Sejarah mencatat DI/TII gagal. Masa Soeharto muncul lagi. Tapi sebagian kelompok radikal di masa Soeharto itu ada yang direkayasa oleh militer atau intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya. Ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII. Sebagian direkrut kemudian disuruh bikin berbagai aksi seperti Komando Jihad dalam rangka mendiskreditkan Islam. Ada pula kasus Haji Ismail Pranoto atau Hispran. Itu yang kita baca dalam laporan-laporan yang sudah dipublikasikan atau laporan pengadilan dan sebagainya. Sejak jatuhnya Soeharto ada era demokratisasi, liberalisasi, dan masa kebebasan. Maka kelompok radikal ini muncul lebih *visible*, lebih militan, dan vokal juga. Apalagi kemudian media massa, khususnya media elektronik seperti TV, banyak meliput. Akhirnya mereka lebih *visible* lagi. Mereka menyampaikan visi, tampil di depan publik itu lebih banyak, demo leluasa dan lain-lain.
- b. Pilihan Metoda dan Pendekatan; Bagi beberapa kelompok, berpoltitik dengan jalan pendidikan dan dakwah (Seperti Muhammadiyah dan NU), dianggap lamban. Oleh karena itu, mereka memilih metoda dan pendekatan melalui politik dan dengan kekerasan dianggap lebih efektif.

## 2. Radikalisme

Radikalisme berasal dari kata radikal, Moeliono (1990: 718-719) mengartikan radikal secara etimologis sama dengan: secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berfikir atau bertindak. Sedangkan secara terminologis radikalisme berarti; a) paham atau aliran yang radikal dalam berpolitik, b) aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial atau politik dengan cara keras atau drastis, c) sikap ekstrim dalam suatu aliran politik. Untuk memahami mengapa muncul radikalisme? Nampaknya harus ditelusuri melalui sejarah munculnya serta perkembangannya. Terus terang agak kesulitan mendapatkan fakta apalagi data tentang hal ini, namun setidaknya beberapa tulisan dapat dijadikan rujukan.

Awal mula munculnya radikalisme sebagaimana dituliskan oleh Jalaluddin (2007:327) dari adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif, biasanya ikut memperbesar peluang bagi munculnya radikalisme. Di Amerika dan Eropa, misalnya muncul gerakan emansipasi wanita yang dikenal radikal. Gerakan ini menuntut persamaan hak, fungsi, dan peran dengan kaum pria. Bahkan, dalam masalah-masalah seksual pun, radikalisme kaum perempuan ini menuntut adanya kesetaraan gender dalam arti yang luas.

Perkembangan selanjutnya sebagaimana dituliskan oleh Jalaluddin (2007:32) bahwa radikalisme muncul dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang sosial dan politik, gerakan ini dikenal dengan pembaharuan yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin dunia, seperti Adolf Hitler, Stalin atau Mao Tse Tung, yang menimbulkan revolusi. Demikian pula dalam sejarah agama-agama mengungkapkan adanya sejumlah gerakan radikal yang jenuh dan berusaha ke luar dari kondisi kemapanan yang beku atau *jumud*. Karena

adanya supermasi penguasa, radikalisme dianggap sebagai gerakan yang ekstrim dan eksklusif akhirnya gerakan yang dilatarbelakanginya menjadi cocok untuk dikaitkan dengan terorisme (Jalaluddin, 2007:328 ).

Dari uraian di atas, ternyata radikalisme tidak selalu berkonotasi negatif. Bila kondisi baru yang tercipta oleh adanya perubahan tersebut bermanfaat bagi peningkatan peradaban dan kehidupan manusia, barangkali radikalisme dapat diterima. Sebaliknya, bila gerakan tersebut menimbulkan malapetaka, maka radikalisme akan mendatangkan kecaman. Beberapa contoh seperti radikalisme kaum Nazi di Jerman yang dipelopori Adolf Hitler, komunisme Rusia di bawah pimpinan Stalin atau di Cina oleh Mao Tse Tung, munculnya kaum Protestan dan Calvinisme membuktikan bahwa radikalisme tidak hanya terkait dengan bidang agama. Apalagi dihubungkan secara langsung dengan terorisme. Jadi, baik radikalisme, fundamentalisme ataupun bentuk gerakan yang diarahkan pada adanya perubahan, semuanya terkait dengan sistem nilai.

Sebagaimana fundamentalisme, maka radikalisme juga dianggap sebagai gerakan yang ekstremisme dan eksklusivisme. Kedua gerakan ini tampaknya cocok untuk dihubungkan dengan terorisme. Namun, setelah dicermati secara mendalam ternyata pandangan yang demikian itu, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari latar belakang politik. Wadah identitas kelompok *vis a vis* dunia sekitarnya yang dianggap dekaden, sebuah dunia iblis yang harus dimusnahkan. Mereka meyakini dirinya paling benar, paling dekat dengan ambang pintu Tuhan.

### **3. Militanisme**

Pengertian militan adalah orang yang bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Sedangkan militan-

isme diartikan sebagai faham yang berhaluan keras, bersemangat tinggi serta penuh gairah (Moeliono, 1990: 583). Lalu mengapa muncul militanisme? Nampaknya kita harus melihat akar sejarahnya terlebih dahulu. Dari sejarah itulah kita akan dapat mengungkap argumen-argumen yang relevan dengan pertanyaan di atas.

Sebagaimana kita pahami bahwa keyakinan merupakan wilayah "hati" dan terkait dengan prinsip-prinsip ajaran agama yang menekankan pada kesucian. Dalam kondisi seperti itu, nalar kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, ketika mitos "dimasukkan" ke nilai-nilai ajaran agama, akal sehat (*common sense*) jadi termandulkan atau terabaikan sama sekali. Orang menjadi mudah percaya dan menerimanya tanpa melakukan kritik. Saat itu, nilai-nilai luhur agama terdesak oleh nilai-nilai mitologis tersebut. Mitologi keagamaan seakan sebuah proses "cuci otak" terhadap para penganutnya.

Dalam sejarah tercatat tentang *harakiri* (pergerakan) dan pasukan *kamikaze* Jepang dalam Perang Dunia II. Berangkat dari konsep yang dikaitkan dengan agama Shinto, dimunculkan mitos bahwa Kaisar Jepang Hirohito sebagai titisan Dewa Matahari (*Amiterasu Omi Kami*). Mitos ini kemudian dikembangkan ke dalam ajaran *Bushido*, yaitu kewajiban untuk mengabdikan kepada pemimpin yang ditunjukkan dalam bentuk kesetiaan untuk berkorban tanpa pamrih. Ajaran *Bushido* menggambarkan sifat kesatria paripurna, dengan cara berani melakukan *harakiri* (menusuk diri dengan pedang samurai) sebagai "tebusan" terhadap pelanggaran "titah" kaisar. Para prajurit "dibaiat" untuk menjadi pasukan berani mati (*kamikaze*).

Dalam penilaian Jalaluddin (2007: 330), pemahaman dan memaknai "jihad" yang mereka lakukan keliru.

Mengapa keliru? Karena mereka beranggapan siapa saja yang tidak sepemahaman dengan mereka dipandang orang kafir, lalu mereka berusaha untuk memerangi orang kafir dengan cara jihad (sesuai dengan persepsinya). Adapun prosesnya melalui: a) *takfir* (mengkafirkan orang yang tidak sepemahaman dengan kelompok mereka walaupun beragama Islam, b) *hijrah* (berupaya untuk merubah atau berhijrah dari keadaan yang dianggapnya salah kepada keadaan yang dianggap benar), dan dengan cara c) *jihad* (memerangi yang dianggap bersebrangan dengan pemahaman mereka).

#### **4. Terorisme**

Terminologi “teroris” belum mencapai kesepakatan bulat dari semua pihak, karena banyak elemen yang terkait dan berbagai berkepentingan. Namun demikian di sini tetap akan dikemukakan beberapa pengertian. Moeliono (1990: 939) mengartikan teror: 1) Perbuatan yang sewenang-wenang (kejam, bengis dan sebagainya); 2) Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan “terorisme” berarti sebuah pemahaman penggunaan kekerasan atau menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Sejalan dengan pemahamannya itu mereka bertindak dengan sengaja menggunakan atau mengancam dengan kekerasan terhadap sipil atau sasaran sipil untuk mencapai tujuan politik. Sedangkan bila mengacu pada Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme pada pasal 6 yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah:

“setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas

kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seseorang dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan, berkelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi”.

Siapakah teroris itu? Untuk mengetahui teroris kita dapat menguraikannya dengan merinci indikatornya sehingga dapat mengindikasikan bahwa teroris itu dapat terindikasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan sengaja; artinya direncanakan, sistematis, dan terorganisasi.
- b. Penggunaan kekerasan; berupa ancaman langsung.
- c. Sasarannya sipil, non-militer.
- d. Tujuannya terkait dengan kepentingan politik.

Merujuk bahwa tujuan yang menjadi targetnya adalah politik, maka sebenarnya terorisme sama sekali tidak terkait dengan agama. Namun, akhir-akhir ini mulai berkembang suara bernada "*miring*" untuk mengaitkan terorisme dengan gerakan keagamaan. Adanya hubungan seperti itu, nampaknya karena dinyatakan oleh seorang pakar strategi keamanan dan terorisme dari Pusat Analisa Strategi Internasional (CISA).

Mengapa Negara-negara Barat mencap negara-negara Islam (termasuk Indonesia) sebagai sarang teroris? Ada sejumlah alasan, antara lain: **Pertama**; Besar kemungkinan karena hasil pemetaan Huntington (*The Clash of Civilization*, 1983). Di mana sejak perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir, kata peradaban oleh sebagian pakar dinilai bisa menjelaskan berbagai permasalahan yang

muncul ke permukaan, termasuk dalam memetakan masyarakat dunia. Huntington (Anwar, 2000:81) mengelompokkan kehidupan masyarakat dunia pada beberapa peradaban besar yang dinilai mempunyai pengaruh yang cukup signifikan, baik secara langsung atau tidak terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat lainnya. **Kedua;** *Term of terorisme* dan *jihad* sering disalahartikan. Dua kata tersebut tidak henti-hentinya menjadi bahan sorotan, menghiasi media masa, dibahas dalam diskusi-diskusi dan seminar. Hasilnya wajah Islam nampak mengerikan karena diidentikkan dengan kekerasan, bahkan oleh banyak media digambarkan sebagai suatu agama yang dengan mudah mengobarkan perang dengan dalih jihad? Dengan demikian, jihad -dalam benak mereka- menjelma menjadi teror yang amat mencekam. Padahal, sesungguhnya tidak demikian karena pengertian jihad adalah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Atau terminologi lain bahwa jihad itu merupakan usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta, benda jiwa, dan raga. Jihad juga berarti perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Jadi jelas, jihad memang tidak menafikkan kekerasan atau peperangan. Tapi itu bukan jalan untuk mengimplementasikan semangat jihad dengan teror. Spektrum jihad dalam ajaran Islam sebetulnya sangat luas. Sayangnya dalam kenyataan tidak jarang orang melakukan simplifikasi makna jihad semata-mata untuk dijadikan alat pembenar bagi tindakannya yang justru melenceng dari konteks jihad itu sendiri. Distorsi jihad semacam itu menjadi amunisi bagi media barat dan kalangan anti Islam lainnya untuk memojokkan umat Islam, terutama terhadap gerakan yang bermaksud kembali kepada ajaran Islam dan mengintensifkan nilai-nilai ke-

Islamannya. **Ketiga**; Stigma politik barat bahwa Islam identik dengan terorisme dan juga radikalisme. Dalam satu dasawarsa terakhir ini cukup banyak informasi yang dihembuskan barat seperti “Islam Militan”. Dari hembusan informasi itulah membuahakan opini yang berkembang di masyarakat Barat bahwa Islam identik dengan terorisme dan radikalisme. Di banyak negara Eropa seperti Inggris, *stereotype* Islam sebagai "dalang" terorisme internasional cukup kental mewarnai pemberitaan media massanya. Fenomena ini secara intelektual biasa saja mengindikasikan kekurangmengertian masyarakat yang bersangkutan mengenai masalah politik Timur Tengah, Arab dan Islam secara lebih obyektif. Tapi penglihatan yang demikian ini bisa saja disengaja karena dan untuk berbagai tujuan terutama politik dan militer. Sehingga menurut klasifikasi Deplu AS, beberapa negara Timur Tengah yang kebetulan mayoritas muslim seperti, Sudan, Libya, Iran dan Irak adalah termasuk negara pendukung atau sponsor terorisme internasional.

Sejauh ini “politik labelisasi” itu merupakan senjata dan atau cara yang digunakan Barat untuk menekan banyak negara yang tidak sejalan kebijakan politiknya. Melalui “politik labelisasi” yang didukung oleh kampanye media secara sistematis dan besar-besaran, maka besar kemungkinan sesuatu yang sebelumnya hanya merupakan sangkaan (praduga) bisa berubah menjadi fakta dan realitas, yang pada gilirannya diikuti dengan penjatuhan hukuman atau sanksi atas nama kemanusiaan. Bila hal ini dirasa kurang cukup, maka suatu negara tidak segan-segan dimasukkan sebagai teroris atau pendukung terorisme itu sendiri. Tragisnya kelompok atau negara yang banyak mendapat cap itu adalah negara-negara muslim, meskipun

pada saat yang sama mereka menolak dikatakan sebagai telah menebarkan kebencian terhadap kaum muslim dan atau agama Islam itu sendiri. Memang keduanya berbeda, tapi dalam praktiknya sangat sulit untuk dibedakan, apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa pelakunya mempunyai latar belakang historis yang "bermusuhan" serta kultural dan agama yang berbeda. Ada kecurigaan kuat bahwa serangan dan rasa permusuhan yang ditujukan kepada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim itu juga ditujukan kepada agama Islam, meskipun secara tidak langsung, mengingat latar belakang mereka yang berbeda dan dalam beberapa hal sifatnya antagonistik, sehingga wajar dan masuk akal jika Huntington mensinyalir kemungkinan terjadinya konflik peradaban.

Sesungguhnya, sikap apriori dan penghakiman Barat terhadap gerakam Islam ini jelas menafikkan catatan sejarah bahwa dalam setiap agama atau kelompok sosial manapun dan di manapun, tentu akan ada perorangan atau sekumpulan individu tertentu yang mempunyai sikap ekstrim dan radikal. Jadi secara sosiologis apa yang dituduhkan dilakukan umat Islam itu juga dilakukan umat, bangsa dan kaum lainnya, baik dulu hingga sekarang. Singkatnya sikap ekstrim dan radikal merupakan fenomena universal, fenomena kemanusiaan yang lahir sebagai respon terhadap politik kekerasan dan ketidakadilan yang masih ada. Oleh karena itu selama masih ada ketidakadilan dan penggunaan jalan kekerasan sebagai penyelesaian masalah, maka radikalisme dan terorisme tidak akan pernah hilang, kecuali dengan mematisikan dan menghilangkan sumbernya.

Dalam paparan Sudarsono (<http://www.kompasiana>) bahwa terorisme mula-mula dilekatkan pada Lybia sebagai negara "sarang teroris" yang selalu dihubung-hubungkan

dengan gerakan pembantu teroris di berbagai pelosok dunia, mulai dari Irlandia Utara hingga ke Filipina Selatan. Akhir-akhir ini sorotan terorisme beralih dari Libya ke Afghanistan dan Irak. Afghanistan diserang karena dinilai sebagai tempat "penampungan" pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Tokoh terorisme internasional ini dituduh terlibat dalam tragedi 11 September 2001, yang menghancurkan gedung WTC dan Pentagon.

Apabila dikaitkan dengan sejarah terorisme, aksi terorisme di Indonesia, menurut Salam (2005:5) mulai pada tahun 1980-an yang digerakkan oleh sebuah keyakinan atau ideologi. Akar masalah aksi terorisme di Indonesia hingga dekade pertama abad 21 sesungguhnya tidak berubah, yaitu ketidakpuasan politik segelintir sempalan dari agama tertentu terhadap berbagai kebijakan negara yang dilaksanakan pemerintah. Selain dipicu oleh ketidakpuasan domestik, terorisme di Indonesia dipicu pula oleh ketidakpuasan pada perubahan lingkungan strategis internasional. Khususnya pada isu Palestina-Israel di mana masyarakat Palestina berada dalam kondisi teraniaya akibat kebijakan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Apabila ditarik lebih jauh lagi, isu terorisme di Indonesia tidak lepas pula dari sejarah perbedaan pandangan antara Islam dengan Barat.

Tulisan Mark Juergenmeyer (Salam, 2005:6) berusaha memahami hubungan antara pandangan keagamaan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dengan tindakan teror yang dilegitimasi oleh kelompok tersebut, lalu ia mencoba mengkolaborasi hubungan keduanya dalam kaitan dengan pandangan yang bersifat kosmik yang dimiliki agama. Setelah tragedi peledakan bom di Legian Bali, 12 Oktober 2002 dan hotel Marriot Jakarta, lalu diungkap siapa pelaku

dan apa motivasinya, berbagai media masa sudah mulai "membuka pintu" untuk menghubungkannya dengan gerakan fundamentalisme Islam, yang dikaitkai pula sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional Al-Qaeda. Pandangan itu menjadi sulit terbantah tatkala Indonesia juga dilanda aksi kekerasan seperti di Bali dan Jakarta. Terasa menyulitkan Indonesia untuk menolak atau setidaknya berapologi kalau negeri ini betul-betul steril dari aksi teroris. Bahkan akibat kasus tragedi Bali itu misalnya, Indonesia dipopulerkan melakukan *support to terorisms* dan sebagai *state of terorism*, karena di negara ini telah memberi kebebasan bagi masing-masing pemeluk agama untuk mengimplementasikan dan mengembangkan ajaran agamanya, termasuk fundamentalisme beragama. Selain dikaitkan dengan persoalan fundamentalisme agama itu, kejahatan terorisme di Indonesia juga merupakan produk dari ketidakadilan dan kejahatan dalam skala global yang langsung maupun tidak langsung, telah dipicu oleh kekuatan negara besar yang menabur neo-hegemonisme dan neo-kolonialisme terhadap negara-negara kecil.

Selama ini terorisme sering diidentikkan dan dilekatkan pada penganut fundamentalisme, utamanya fundamentalisme agama yang kemudian disebut-sebut sebagai *anak kandungannya* agama Islam, artinya agama Islam diposisikan sebagai terdakwa yang ajaran-ajarannya membenarkan dan menghalalkan kekerasan sebagai tajuk perjuangan. Apalagi sejak Amerika menuduh Osama bin Laden sebagai satu-satunya dalang teroris penghancuran gedung kembar WTC dan Pentagon, agama (Islam) kembali makin diposisikan sebagai spirit utama lahirnya kekuatan-kekuatan fundamentalis dan ekstremis, termasuk pelaku kekerasan atas nama agama atau teror atas nama Tuhan.

Jika menjelajah asumsi atau tepatnya tuduhan di atas, tentu saja kalau benar, bahwa pelaku terorisme adalah gerakan Islam Fundamentalisme, hal ini disebabkan karena adanya pemahaman keagamaan yang eksklusif, skripturalis dan miskinnya pemahaman realitas historis dalam menafsirkan pesan esoteris teks-teks kitab suci, sehingga mewariskan sikap-sikap yang fanatik, dogmatik, eksklusif dan intoleran dalam menyikapi realitas perbedaan dan kondisi pluralitas sosial, politik, budaya dan ekonomi, bahkan termasuk dalam menyikapi wilayah juang dalam mengimplementasikan prinsip "menegakkan kebajikan dan mencegah kejahatan/kemunkaran" (*amar makruf nahi munkar*) dan prinsip "jihad".

Sebagai "aksi agama", dalam suatu persepsi komunitas agama tertentu, adalah kewajiban yang menuntut implementasi ketika aksi itu ditujukan sebagai bentuk konkret perjuangan menegakkan/keadilan, kebenaran, dan harkat kemanusiaan. Misalnya dalam konsep Islam, "*amar ma'ruf nahyil munkar*" oleh suatu komunitas telah ditempatkan sebagai prinsip jihad yang menuntut totalitas kapabilitas dirinya, sehingga ketika konsep ini dijadikan ruh dan prinsip perjuangan menegakkan ajaran agama, maka dampaknya adalah terjadinya benturan dengan kekuatan komunitas sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain serta kepentingan-kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi yang dibangun oleh negara, yang pemerintahnya tidak punya keinginan untuk memperbaiki ketimpangan moral-strukturalnya. Jadi, kejahatan terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat dapat berakar dari sisi doktrin keagamaan yang ditangkap dan dipahaminya secara eksklusif historis sebagai kewajiban, artinya mereka tetap menempatkan aksi-aksi fundamen-

talistiknya dan radikalistiknya sebagai kewajiban yang digariskan dan disahkan agama, meskipun posisinya harus berhadapan dengan stigma yang diterima dari negara atau hukum yang berlaku dan kelomok agama lain sebagai teroris, fundamentalis, dan jaringan "Islam ekstrem".

Tentu saja, sikap keberagamaan seperti ini berangkat dari keyakinan yang ekstrim akan kebenaran apa yang dianutnya. Akibatnya akan memunculkan gerakan *purification* (pemurnian ajaran), baik dalam lingkup eksternal maupun internal. Secara internal mereka akan menganggap bahwa ajaran atau ideologi yang mereka anut adalah yang paling benar sedang di luar kelompok mereka berada pada posisi yang salah. Secara eksternal mereka akan melakukan perlawanan terhadap entitas yang berbeda dan berlawanan dengan dogma dan ideologi yang mereka anut. Hal ini tampak, bahwa kelompok Islam ini masih memposisikan secara dikotomik dan antagonistik terhadap berbagai ragam pemahaman atas Islam yang berlawanan dengannya. Selanjutnya dalam konteks inilah terminologi jihad mengalami reduksi pemaknaan.

Sebagai fenomena teks keagamaan, kata "*jihad*" seringkali dipahami oleh kelompok eksklusif sebagai suatu tindakan yang lekat dengan kekerasan. Dalam kaitannya dengan hal ini maka asumsi komunitas keagamaan eksklusif menyebut tidak sepenuhnya salah bila terorisme diidentikkan dengan Islam. Hal demikian ini didukung dalil yang menyebutkan bahwa sesungguhnya setiap agama sangat potensial memunculkan fundamenlisme yang kemudian berkembang menjadi terorisme bila agama dianut secara eksklusif-tekstualistik dan intoleran dalam menyikapi realitas yang timpang dan anomi.

Namun, demikian kata Jalaluddin (2007: 32) apakah terorisme terkait langsung dengan agama, memang sulit untuk dijawab secara singkat. Apalagi dikaitkan dengan agama tertentu. Oleh karena itu, dengan tidak berpretensi melakukan pembelaan maka sesungguhnya asumsi yang selalu melekatkan Islam dengan teroris adalah merupakan pemahaman yang sumir dan berat sebelah. Sebab, secara idealitas, agama (Islam) sebenarnya mengandung misi fundamental universal, yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW, *"Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah perdamaian, eratkanlah tali persaudaraan, berikan makan, kerjakanlah shalat ketika kebanyakan orang tidur di waktu malam, maka kamu akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan"*.

Pesan itu mengajarkan, bahwa agama (Islam) mengandung ajaran mulia, karena norma-normanya bermisikan memuliaan atau memartabatkan manusia. Kekerasan tidak boleh diajukan sebagai pilihan untuk mewujudkan cita-cita (ideologis), keyakinan, kepercayaan dan "tafsir" keagamaan. Misi substansinya adalah penyebarluasan perdamaian global, hidup antar sesama manusia dan antar bangsa di muka bumi dengan rajutan persaudaraan universal. Perbedaan dalam memahami agama idealnya ditempatkan dalam koridor sebagai pencerahan nalar keagamaan dan intelektualisasi spiritualitas yang inklusif ibarat demokratisasi dalam "bermadzhab".

Kalau pesan bersubstansi moral itu berhasil ditegakkan, maka sulit terhalang untuk mengimplementasikan perlindungan hak asasi manusia. Agama yang semula "dikembangkan" sebagai wujud dogma yang angker (fundamentalisekstremis), eksklusif, dan intoleran akhirnya dapat lebih

tampak kekuatan normanya yang punya keberpihakan yang tinggi terhadap HAM.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan pokok-pokok pikiran untuk pengembangan materi PU/Nilai dan PAI, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian teori normatif politik menjadikan kekuasaan sebagai perantara untuk mewujudkan nilai ideal. Sedangkan realitasnya, bagi kebanyakan politisi, mengkrystal menjadi kekuasaan sebagai tujuan akhir.
- b. Ada tiga pola hubungan agama dengan politik yaitu: 1) integristik, 2) sekularistik, dan 3) simbiotik. Indonesia lebih cenderung masuk pada pola simbiotik, karena agama memandang penting kekuasaan dan karena tuntutan situasi sosial dan politik, bukan karena tuntutan agama.
- c. Agama dijadikan alat dan justifikasi politik oleh sebagian orang, karena : 1) logika religi memandang agama sebagai petunjuk/penuntun umat manusia yang bersifat eksternal, transendental, abadi, absolut dan mutlak dengan segala kesempurnaan, 2) agama dan negara, satu sama lain saling memerlukan serta saling menguntungkan, 3) pemahaman keagamaannya sangat literer atau harfiah dan dengannya mereka melakukan tindakan politik tertentu, dan 4) tidak ada kebaikan dalam agama jika mengasingkan politik, dan tidak ada kebaikan dalam politik jika meninggalkan agama.
- d. Akar masalah mencampuradukan ajaran agama dengan politik karena alasan-alasan: 1) landasan filosofis tentang politik dan fiqh politik berkaitan dengan pemaknaan "*Islam Kaaffah*", 2) terdapat pemahaman yang perlu dikritisi dalam berpolitik di Indonesia sebagai pengaruh pola pikir

yang ditanamkan Barat terhadap dunia Islam yang mendikotomkan agama dengan politik, dan 3) ajaran agama (Islam) sarat norma dan etika untuk membimbing aktivitas politik serta mengendalikan aturan main hukum ketatanegaraan.

- e. Argumen pencampuradukan antara agama dan politik adalah: 1) Secara realita menunjukkan banyak partai politik yang berdasarkan agama dan pemimpin agama banyak yang menjadi politikus, 2) karakter negara berkembang agama dijadikan komoditas politik, 3) untuk mendapatkan dukungan publiknya, 4) agar agama dijadikan landasan nilai-nilai moral dalam berpolitik, dan 5) berbagai peran agama (Islam) dalam pembinaan moral bangsa, yaitu sebagai: (a) pengisi perbendaharaan moral, (b) pengarah terhadap keseimbangan antara budaya dan agama, (c) motivator, dinamisator, dan inovator dalam menghadapi tantangan zaman, (d) pembuka wawasan kearah yang lebih luas, dan (e) acuan moral guna mencapai tingkat yang lebih mantap.
- f. Kebenaran dalam pandangan Islam berakar pada hakikat Islam yang diturunkan Allah. Karena keterbatasan manusia di antara mereka ada yang kesulitan sehingga terjadi pembiasaan pemaknaan agama. Argumennya karena: 1) kesulitan untuk menemukan kebenaran pemahaman agama, 2) kesalahan hermeneutika menafsirkan bahasa agama, 3) dalam al-Quran terdapat ayat-ayat *mutasyabihat*, bermakna samar, dan *interpretable*, d) dalil-dalil belum diketahui, 4) belum terjangkau atau lupa, 5) memahami agama secara parsial dan sepotong-sepotong, 6) agama disampaikan dengan cara (metoda) yang keliru, 7) situasi dan motivasi politik sepeninggal nabi cenderung memasukkan unsur-unsur lain (politik) ke dalam agama, 8)

- situasi sosial sekarang berbeda dengan saat lahirnya agama-agama, dan 9) teks (wahyu) bersifat *mujmal* (umum) dan fleksibel, sehingga memungkinkan atau berpeluang untuk pembiasan makna dan kebenaran agama.
- g. Fundamental adalah sebuah paham keagamaan yang menitikberatkan pada pemaknaan teks-teks keagamaan secara literal-tekstual, dengan mengabaikan sisi-sisi kontekstual-substantifnya. Akan tetapi ada stigmanya negatif, argumennya adalah: 1) akar historis fundamentalisme, 2) politis fundamentalisme, dan 3) adanya stigma barat. Sedangkan argument munculnya gerakan fundamentalisme di Indonesia karena faktor sejarah dan pilihan metoda dan pendekatan melalui politik dan perjuangan dengan kekerasan dianggap lebih efektif.
  - h. Awal mula munculnya radikalisme karena adanya perlakuan yang bersifat diskriminatis, kemudian muncul dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik, serta karena adanya supermasi penguasa. Bila kondisi baru yang tercipta oleh adanya gerakan radikalisme bermanfaat bagi peningkatan peradaban dan kehidupan manusia, radikalisme dapat diterima.
  - i. Militanisme diartikan sebagai faham yang berhaluan keras, bersemangat tinggi serta penuh gairah. Pada pasca kemerdekaan muncul kelompok militan dalam berpolitik, masa orba ada keompok yang direkayasa dalam rangka mendiskreditkan Islam, dan pada era reformasi kelompok ini lebih leluasa. Mereka beranggapan bahwa berpolitik dengan cara kekerasan lebih efektif, "jihad" mereka didasari keyakinan yang dapat melahirkan keberanian. Prosesnya dengan a) *takfir*, b) *hijrah*, dan c) *jihad* .
  - j. Terorisme berarti penggunaan kekerasan atau menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan,

terutama tujuan politik. Terorisme sama sekali bukan ajaran agama (Islam). Adanya upaya barat mencap negara-negara Islam (termasuk Indonesia) sebagai sarang teroris karena: 1) hasil kebijakan politik luar negri AS, 2) *Term of terorisme* dan jihad disalah artikan, c) adanya stigma politik barat bahwa Islam identik dengan terorisme dan juga radikalisme dengan kekuatan rekayasa media massa.

- k. Akar masalah aksi terorisme di Indonesia adalah: 1) ketidakpuasan segelintir sempalan agama tertentu terhadap berbagai kebijakan pemerintah, 2) dipicu oleh sejarah perbedaan pandangan antara Islam dengan Barat, dan 3) adanya fakta oknum fundamentalis yang melakukan teror. Adapun yang menjadi landasannya adalah urusan teologi mereka; Pemahaman keagamaan yang eksklusif, skripturalis dan miskinnya pemahaman realitas historis sehingga bersikap fanatik, dogmatik, dan intoleran. Secara idealitas, agama sebenarnya adalah ajaran mulia, menyebarkan perdamaian global, menjunjung tinggi HAM.

## **2. Saran Implementasi**

Dari uraian di atas disarankan beberapa implikasi untuk pengembangan materi PU/Nilai, lebih khusus lagi dalam PAI, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu tema penting materi PU/Nilai adalah teologi politik, karena bila menjauhkan agama dari dunia politik maka membuat politik berwajah kotor.
- b. Pengembangan materi PAI diarahkan pada konsep Islam *kaaffah* untuk menghindari bahaya pemahaman yang salah dan bias.
- c. Melalui PU/Nilai perlu diupertegas isu-isu kontemporer secara benar, sekaligus mampu membalik jargon radikal dan sempalan ini. Akhirnya kesadaran untuk saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat dan

- hasil karya intelektual orang lain menjadi suatu keharusan, untuk selalu dipupuk dan ditumbuhsurburkan dalam kehidupan sosial keagamaan kita.
- d. Melalui PU/Nilai hendaknya kita mampu membangun citra Islam ke-Indonesiaan, yang memiliki spirit progresif, berorientasi ke masa depan, responsif terhadap perkembangan kemanusiaan, moderat, terbuka, ramah, menghargai pluralisme dan kedamaian, dan bisa memberikan simpatik dan menimbulkan citra baik Islam dalam pandangan siapapun.
  - e. Perlu terus diupayakan perbaikan metode mempelajari Islam dan pemilihan materi pendidikan agama (Islam) untuk menghindari dan meluruskan pemaknaan agama.
  - f. Untuk menghindari bahaya *ghozwul fikr* pada kalangan umat beragama, khususnya umat Islam, dipandang penting ada kajian tentang 'agama dan politik'. Pada Prodi PU/Nilai dan Prodi PAI.

## G. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quan Al-Karim dan Terjemahannya.

Amin, Miska Muhammad, (1983), *Epistemologi Islam*, Jakarta, Penerbit UI.

Anwar, Chairil, (2000), *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

'Azhim, Abdul, Said, (2005), *Ukhuwwah Islamiyah; Persaudaraan Iman*, Penerjemah M. Misbahul Khoer dan Sari Nurul Lita, Jakarta, Qisthi Press.

Azra, Azyumardi, (2002), *Radikalisasi Salafi Radikal*, Majalah *Tempo*, tanggal 15 Desember 2002,

Double, Abdul Karim, (2007), *Islam Nusantara*, Yogyakarta, Pustaka Book Publisher, Graha Pustaka.

- Hidayat, Komaruddin, (2003), *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta, Teraju-Mizan.
- Jalaluddin, (2007), *Psikologi Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kahmad, Dadang, (2000), *Sosilogi Agama*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Moeliono, A. dkk. (1990), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mukti Ali (t.t.), *Keesaan Tuhan Dalam Al-Quran*, Yogyakarta, Yayasan Nida'
- Nasution, Harun, (1979), *Kedudukan Akal dalam Islam*, Jakarta, Yayasan Idayu.
- Salam, Moch Faisal, (2005), *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Sekretariat Negara, (2002), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.
- Tibi, Bassam, (2000), *Ancaman Fundamentalisme; Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta; PT Tiara Wacana.
- Watt, William Montgomery, (2003), *Fundamentalis dan Modernitas dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Zubaidi, M., (2007), *Islam dan Benturan Antar Peradaban*, Jogyakarta, Ar-Ruuz Media Grup.
- <http://m/hawwww.tempointeraktif.corian/wawancara/waw-Azyumardi02.html>
- <http://www.kompasiana.com/ubaidah.musytaq-wafiqoh/terorisme-dan-gerakan-keagamaan>.
- <http://www.tempo.co.id/majalah/arsip/thn05/edisi41/kol-1.html>.